

## BAB III

### HUBUNGAN ANTARA DANISH REFUGEE COUNCIL, SURIAH, DAN YORDANIA

#### A. Kondisi Sosial Politik Suriah di Bawah Rezim Presiden Bashar al-Assad



**Gambar 2.** Peta Suriah. Dari “The World Factbook: Middle East: Syria,” oleh Central Intelligence Agency, 2018, (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html>). Dalam domain publik.

Suriah (Bahasa Inggris: Syria; Bahasa Arab: سوريا *Sūriyā*) merupakan salah satu negara yang berada dalam wilayah Timur Tengah dengan nama resmi Syrian Arab Republic (Bahasa Arab: الجمهورية العربية السورية *al-Jumhūrīyah al-‘Arabīyah as-Sūrīyah*). Negara ini terdiri dari 14 provinsi, yakni Aleppo, Al-Hasakah, Ar-Raqqah, As-Suwayda, Damaskus, Daraa, Dayr az-Zawr, Hama, Homs, Idlib, Latakia, Quneitra, Rif Dimashq, dan Tartus, dengan Damaskus sebagai ibu kotanya. Luas Total wilayah 14

provinsi tersebut mencapai 185.180 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 183.630 km<sup>2</sup> daratan, dan 1.550 km<sup>2</sup> perairan (Central Intelligence Agency, 2018). Wilayah tersebut berbatasan dengan Turki di sebelah utara, Irak di sebelah timur, Yordania di sebelah selatan, dan Laut Tengah di sebelah barat.

Suriah pernah diperintah oleh kerajaan Mesir, Het, Sumeria, Mitanni, Asyur, Babylonia, Kanaan, Fenisia, Aram, Amori, Persia, Yunani, dan Romawi di sepanjang zaman kuno. Setelah Kekaisaran Romawi runtuh, Suriah sempat juga menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Ottoman (History.com Staff, 2017). Setelah Perang Dunia I dan runtuhnya kekaisaran Ottoman, Suriah berada di bawah pemerintahan Perancis hingga akhirnya merdeka pada tahun 1946. Setelah merdeka, kondisi politik Suriah tidak stabil dan terjadi kudeta militer pada tahun 1949, 1954, 1961, 1963, dan 1966 (TeachMideast, 2016). Sepanjang kondisi politik yang tidak stabil tersebut, Suriah dan Mesir sempat bersatu untuk membentuk Republik Arab Bersatu pada tahun 1958 dan berpisah kembali pada tahun 1961. Ketidakstabilan politik tersebut berakhir setelah Hafez al-Assad yang merupakan anggota Partai Sosialis Ba'ath dan sekte Alawi melakukan kudeta dan berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1970. Setelah kemenangannya tersebut, Hafez al-Assad memerintah Suriah secara otoriter hingga kematiannya. Kemudian, Presiden Bashar al-Assad menggantikan ayahnya sebagai kepala negara Suriah Sejak 17 Juli 2000 hingga sekarang dengan tipe pemerintahan yang juga sangat otoriter (Central Intelligence Agency, 2018).

Penduduk Suriah terdiri dari etnis Arab Suriah 74,9%, Arab Badui 7,4%, Kurdi 7,3%, Arab Palestina 3,9%,

Armenia 2,7%, dan etnis-etnis lain 3.8%. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh penduduk Suriah, dan menjadi bahasa resmi di Suriah. Selain Bahasa Arab, terdapat bahasa lain juga digunakan di Suriah oleh etnis tertentu dan di tempat tertentu. Misalnya saja Bahasa Kurdi yang digunakan di wilayah paling timur laut dan barat laut Suriah; Bahasa Turki yang digunakan di sepanjang perbatasan antara Suriah dan Turki, serta di wilayah pedesaan sebelah timur sungai Efrat; Bahasa Armenia digunakan di kota-kota besar di Suriah seperti Aleppo; Serta Bahasa Perancis dan Bahasa Inggris yang digunakan di wilayah perkotaan, terutama oleh akademisi. Sebagian besar penduduk Suriah tersebut adalah pemeluk agama Islam, yakni Islam Sunni 74%, dan Islam Syiah Alawi 11%. Selain Islam, penduduk Suriah juga menganut Kristen Ortodoks 5%, Druze 3%, Katolik Roma 2% dan lain-lain 2%. Sementara 3% sisanya adalah ateis dan tidak beragama (Hourani, et al., 2018). Jumlah semua penduduk Suriah mencapai angka 20 juta jiwa pada tahun 2011 dan kemudian menurun hingga 17 juta jiwa pada tahun 2016 (Assessment Capacities Project, 2016). Penurunan jumlah penduduk tersebut diakibatkan oleh perang sipil yang melanda Suriah sehingga banyak penduduk Suriah yang meninggal, dan banyak pula yang mengungsi ke negara lain.

Perang saudara di Suriah dipicu oleh revolusi Arab Spring, gelombang protes dan pemberontakan pro-demokrasi di Afrika Utara dan Timur Tengah yang dimulai di Tunisia pada 18 Desember 2010, dan kemudian merambat ke Mesir, Yaman, Libya, dan Suriah pada awal 2011. Selain dipicu oleh revolusi Arab Spring, perang saudara di Suriah juga dipicu oleh kekeringan parah yang melanda Suriah dan kondisi ekonomi yang

tertinggal, serta kurangnya kebebasan umum dan pemerintahan yang otoriter di mana terjadi penangkapan dan penyiksaan sekelompok remaja dari kota Deraa yang menulis grafiti anti pemerintah pada Maret 2011. Berawal dari penangkapan dan penyiksaan para remaja tersebut, aksi protes pro-demokrasi merebak hampir di seluruh Suriah. Menyikapi aksi protes ini, Pemerintah Suriah menggunakan kekuatan polisi, militer, dan paramiliter untuk menangkap dan membunuh ratusan pemberontak. Kemudian para pemberontak yang didominasi oleh muslim Sunni membentuk Tentara Pembebasan Suriah atau Free Syrian Army (FSA). Sejak dibentuknya FSA, banyak pemberontakan yang terjadi, dan orang-orang yang terbunuh, terutama ketika terjadi serangan senjata kimia yang menurut Amerika Serikat merupakan perbuatan Pemerintah Suriah, sementara Pemerintah Suriah mengatakan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh FSA (History.com Staff, 2017).

Tak hanya Pemerintah Suriah dan FSA, konflik ini juga melibatkan dan didukung oleh pihak-pihak eksternal, yaitu Rusia, Iran, Amerika Serikat, Inggris, PBB, Cina, Rusia, Mesir, Turki, Israel, dan Irak. Rusia dan Iran mendukung Pemerintah Suriah dengan melakukan intervensi militer ke Suriah, sementara Amerika mendukung oposisi Pemerintah Suriah (Macalester College, 2016). Oposisi Pemerintah Suriah memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad; melucuti pasukan polisi, militer, dan paramiliter Suriah; mewujudkan persatuan negara dan penduduk Suriah; serta memastikan kedaulatan dan kemerdekaan nasional Suriah (BBC News, 2013). Negosiasi politik antara Pemerintah Suriah dan oposisinya telah dilakukan sejak 2014. Namun negosiasi yang dilakukan di Konferensi Jenewa dan didukung oleh PBB tersebut tidak

berhasil membuahkan resolusi konflik (Central Intelligence Agency, 2018).

Konflik yang terjadi di Suriah ini kemudian diperparah dengan bergabungnya kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) untuk memerangi Pemerintah Suriah. ISIS yang dibentuk pada tahun 2013 ini, merupakan cabang dari organisasi teroris Al-Qaeda yang mengikuti praktik fundamentalis doktrin Wahhabi (Macalester College, 2016). Tak hanya sampai di situ, suku Kurdi juga mulai ikut terlibat dalam peperangan ini dengan membentuk Pasukan Demokrat Suriah. Pasukan ini memerangi Pemerintah Suriah dan sekaligus ISIS sehingga mendapat dukungan dari Amerika Serikat juga (Nuclear Threat Initiative, 2018).

Perang sipil yang berlangsung selama bertahun-tahun ini menyebabkan kondisi sosial dan politik di Suriah jadi memburuk. Berdasarkan laporan Syrian Network for Human Rights (SNHR), sejak tahun 2011 hingga tahun 2017, terdapat sekitar 206.923 warga sipil yang meninggal akibat konflik ini. 24.799 orang di antaranya adalah anak-anak; 23.502 orang adalah perempuan; 743 orang adalah tenaga medis; dan 615 orang adalah aktivis media. 190.723 (92,17%) korban jiwa meninggal akibat serangan pasukan Pemerintah Suriah dan milisi Iran; 4.102 (1,98%) korban jiwa meninggal akibat serangan pasukan Rusia; 3.819 (1,85%) korban jiwa meninggal akibat serangan faksi oposisi bersenjata; 3.731 (1,8%) korban jiwa meninggal akibat serangan kelompok Islam ekstremis; 945 (0,46%) korban jiwa meninggal akibat serangan pasukan koalisi internasional; 529 (0,25%) korban jiwa meninggal akibat serangan suku Kurdi; dan 3.074 (0,46%) korban jiwa meninggal akibat serangan pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam konflik ini

(Syrian Network for Human Rights, 2017). Sementara menurut laporan Syrian Center for Policy Research, sekurang-kurangnya terdapat 470.000 warga Suriah, baik warga sipil maupun bukan warga sipil yang meninggal antara tahun 2011 hingga tahun 2016. Jumlah tersebut dua kali lipat lebih banyak dari jumlah perhitungan PBB satu setengah tahun sebelumnya, yakni 250.000 korban jiwa. Sejak konflik ini mulai terjadi, angka harapan hidup penduduk Suriah berkurang sebanyak 14 tahun, yaitu dari 70 tahun menjadi 56 tahun (Barnard, 2016).

Tak hanya memakan korban jiwa, perang sipil ini juga membuat kurang lebih 760.000 bangunan hunian di kota-kota Suriah hancur dan tak bisa ditinggali. Penduduk kota yang rumahnya hancur tersebut, secara otomatis menjadi pengungsi internal atau menjadi pengungsi lintas batas. Ditambah penduduk dari wilayah pedesaan, terdapat 3,2 juta orang atau 40% dari jumlah total pengungsi internal berada di wilayah perkotaan seperti kota Aleppo dan kota Lattakia. Karenanya, tingkat urbanisasi di Suriah meningkat dari 51% di tahun 2010 menjadi 76% di akhir tahun 2014 (United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2016). Sejak konflik di Suriah mulai terjadi, sekitar 50 keluarga menjadi terlantar pada tiap harinya. Terdapat 6,5 juta orang termasuk 2,8 juta anak-anak yang terlantar dan menjadi pengungsi internal di Suriah (United Nations High Commissioner for Refugees, 2016). Sementara itu, jumlah penduduk Suriah yang menjadi pengungsi lintas batas ke negara-negara lain mencapai angka 5.604.005 orang. Saat ini, terhitung 3.546.905 (63,3%) pengungsi Suriah berada di Turki; 976.065 (17,4%) pengungsi Suriah berada di Libanon; 666.596 (11,9%) pengungsi Suriah berada di Yordania; 251.157 (4,5%) pengungsi Suriah berada di Irak; 129.737 (2,3%) pengungsi Suriah berada di Mesir; dan 33.545

(0,6%) pengungsi Suriah berada di Afrika Utara (Operational Portal Refugee Situations, 2018).

Selain bangunan hunian, 35% bangunan sekolah di wilayah perkotaan Suriah juga tidak bisa digunakan karena rusak, atau karena digunakan untuk kepentingan lain, seperti tempat berteduh atau sebagai markas militer (United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2016). Sementara di seluruh Suriah, sekitar satu dari empat bangunan sekolah hancur, dan 52.500 tenaga pengajar tidak berada di pos mereka lagi (Hurrell, et al., 2016). Berdasarkan perkiraan Departemen Pendidikan Suriah, terdapat kurang lebih 1,9 juta anak yang tidak bisa mengakses layanan pendidikan sejak terjadinya konflik ini. 1,1 juta di antaranya merupakan pengungsi internal Suriah, sementara sisanya merupakan pengungsi lintas batas di negara-negara lain. Untuk mengatasi masalah ini, 1.615 sekolah yang masih aktif memberlakukan dua sesi untuk setiap harinya, yaitu sesi pagi dan sesi sore (Danish Refugee Council, 2014).

Sama halnya dengan layanan pendidikan, penduduk Suriah juga kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan. Hal ini dikarenakan adanya 336 serangan pada 240 fasilitas kesehatan yang mengakibatkan 697 tenaga kesehatan meninggal dunia antara tahun 2011 hingga tahun 2015. Akibatnya, petugas kesehatan berkurang hingga 55% dari jumlah sebelum terjadinya konflik, dan 58% dari 113 rumah sakit umum tidak bisa berfungsi dengan baik atau justru tidak bisa berfungsi sama sekali (Hurrell, et al., 2016).

Kondisi perekonomian Suriah tak kalah buruknya dengan semua kondisi sosial dan politik Suriah yang sudah dipaparkan di atas. Konflik yang terjadi sejak 2011 telah

menghancurkan perekonomian Suriah dengan menewaskan banyak penduduk Suriah yang merupakan pelaku ekonomi, merusak persediaan modal dan faktor-faktor produktif, hingga mengganggu kegiatan ekonomi seperti. Menurut perkiraan Syrian Center for Policy Research, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh konflik ini mulai dari tahun 2011 hingga 2016 mencapai angka \$ 225 milyar. Angka pengangguran meningkat sekitar 14% dari tahun 2011, yakni 50% dari semua penduduk Suriah. Angka kemiskinan juga meningkat. Sekurang-kurangnya 70% penduduk Suriah berada dalam kemiskinan yang ekstrem. Makanan sangat sulit untuk didapatkan hingga banyak penduduk yang meninggal karena kelaparan, terutama bagi yang tinggal di daerah-daerah yang terkepung. Yang lebih memprihatinkan dalam konflik ini, makanan kerap dijadikan senjata perang dengan mengalihkannya ke pasar gelap, atau hanya didistribusikan ke daerah-daerah yang disetujui oleh pemerintah saja (Hurrell, et al., 2016).

## B. Kondisi Sosial Politik Yordania di Bawah Rezim Raja Abdullah II



**Gambar 3.** Peta Yordania. Dari “The World Factbook: Middle East: Syria,” oleh Central Intelligence Agency, 2018, (<https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/jo.html>). Dalam domain publik.

Yordania (Bahasa Inggris: Jordan /'dʒɔːrdən/; Bahasa Arab : الأُرْدُنّ Al 'Urdunn) yang memiliki nama formal Hashemite Kingdom of Jordan (Arabic: المملكة الأردنية الهاشمية Al-Mamlakah Al-Urdunniyah Al-Hāshimīyah) merupakan negara di Timur Tengah dengan luas wilayah mencapai 89.342 km<sup>2</sup>. Wilayah yang terdiri dari daratan seluas 88.802 km<sup>2</sup> dan perairan seluas 540 km<sup>2</sup> ini berbatasan dengan Irak di sebelah timur laut, Arab Saudi di sebelah timur dan tenggara, Israel di sebelah barat, serta Suriah di sebelah utara. Sama halnya dengan Suriah, Yordania juga pernah berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Ottoman, dan saat Kekasarian Ottoman runtuh, keduanya diperintah oleh negara lain sesuai mandat dari Liga Bangsa-Bangsa yang sekarang menjadi

PBB. Namun, yang menerima mandat atas Yordania setelah Perang Dunia I adalah Inggris, sementara yang menerima mandat atas Suriah adalah Perancis. Pada tahun 1946, Yordania memperoleh kemerdekaannya dan menjadi Hashemite Kingdom of Jordan. Saat ini, Yordania berada di bawah kepemimpinan Raja Abdullah II sebagai kepala negara sejak 7 Februari 1999, dan Perdana Menteri Omar al-Razzaz sebagai kepala pemerintahan sejak 4 Juni 2018 dengan tipe pemerintahan monarki konstitusional parlementer. Pemerintahan ini memiliki 12 divisi administratif, yaitu Kegubernuran Ibu Kota (Amman), Kegubernuran Ajloun, Kegubernuran Aqaba, Kegubernuran Balqa, Kegubernuran Irbid, Kegubernuran Jerash, Kegubernuran Karak, Kegubernuran Ma'an, Kegubernuran Madaba, Kegubernuran Mafraq, Kegubernuran Tafilah, dan Kegubernuran Zarqa (Central Intelligence Agency, 2018).

Penduduk Yordania terdiri dari berbagai etnis yang berbeda, yaitu Arab, Sirkasia, Armenia, Chechen, Druze, Kurdi, dan lain-lain. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Suriah mencapai angka 8.185.384 jiwa. Jumlah itu juga meliputi para imigran dari Mesir, Iran, Yunani, dan negara-negara Eropa, serta 2,7 juta pengungsi dari Palestina, Irak, Yaman, dan Suriah (Teachmideast, 2018). Termasuk pula 800.000 pekerja rumah tangga migran dari Indonesia, Filipina, Sri Lanka dan negara-negara lain (Human Rights Watch, 2016). Jumlah total penduduk Yordania tersebut kemudian meningkat hingga 10.248.069 penduduk pada tahun 2018. Kenaikan angka jumlah penduduk ini dipengaruhi dengan semakin banyaknya pengungsi yang masuk ke Yordania dan kemudian berketurunan di sana. Jumlah pengungsi di Yordania sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018 adalah

2.175.491 pengungsi dari Palestina, 66.873 pengungsi dari Irak, 11.552 pengungsi dari Yaman, dan 666.596 dari Suriah (Central Intelligence Agency, 2018).

Kondisi perekonomian Yordania pada tahun 2015 dan 2016 sangat buruk. Saat itu Pemerintah Yordania terpaksa menjalankan pemerintahannya dengan defisit US\$ 1,8 miliar. Hutang publik Yordania pada tahun pertama perang sipil Suriah, yakni 2011 mencapai US\$ 18,9 miliar. Jumlah tersebut kemudian meningkat hingga hampir dua kali lipat di tahun 2016, yaitu sebesar US\$ 35,2 miliar. Penyebab krisis ekonomi Yordania ini adalah adanya masalah struktural dan kebijakan-kebijakan domestik yang buruk. Misalnya saja pengeluaran untuk sektor publik seperti listrik dan layanan air bersubsidi yang membengkak, dan gagalnya Pemerintah Yordania untuk menemukan solusi energi yang tahan lama. Namun, Pemerintah Yordania justru menyalahkan pengungsi Suriah atas krisis ekonomi yang sudah berlangsung bahkan sebelum pengungsi Suriah masuk ke Yordania (Luck, 2016). Banyaknya pengungsi dari empat negara tetangganya, memang membuat Pemerintah Yordania semakin kesulitan. Karenanya, Pemerintah Yordania menandatangani nota kesepahaman tiga tahun yang tidak mengikat dengan Amerika Serikat pada Februari 2015, sehingga Amerika Serikat menaikkan jumlah bantuan yang tiap tahunnya sebesar US\$ 660 juta menjadi US\$ 1 miliar per tahun. Pada Mei 2015, Yordania menerima bantuan sebesar US\$ 80 juta dengan ditandatanganinya dua perjanjian hibah oleh Pemerintah Yordania dan Saudi Development Fund. Hibah tersebut dimaksudkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur kawasan industri baru Yordania. Kemudian, Uni Eropa juga memberikan bantuan kepada Yordania sejumlah US\$ 59 juta pada Agustus 2015, khusus untuk sektor pendidikan yang juga

terkena dampak krisis pengungsi Suriah (Human Rights Watch, 2016). Namun semua bantuan dari komunitas internasional yang diterima oleh Yordania untuk menangani para pengungsi hanya menutupi 5,5 persen dari seluruh biaya yang dibutuhkan, yakni US\$ 2,9 miliar, setara dengan 8% produk domestik bruto (PDB) Yordania (Awadallah, 2015).

Tak hanya kondisi ekonominya saja, kondisi politik Yordania pada saat itu juga tidak stabil. Ketidakstabilan ini diakibatkan oleh meluasnya korupsi, lambatnya laju reformasi, berkurangnya basis dukungan pada suku inti rezim yang berkuasa, adanya *economonic privation*, dan potensi *spillover* dari konflik negara-negara tetangga Yordania, khususnya Suriah (Satloff & Schenker, 2016). Pemerintah Yordania membatasi kebebasan berekspresi, menahan serta memberikan dakwaan terhadap aktivis, pembangkang, dan jurnalis. Pidato atau bentuk ucapan apapun yang dianggap kritis terhadap raja, lembaga dan pejabat pemerintah, dan Islam, serta yang dianggap mencemarkan nama baik orang lain dikriminalisasi. Terkadang kriminalisasi ini dilakukan di bawah amandemen 2014 terhadap undang-undang kontraterorisme negara yang terlalu luas dan tidak jelas (Human Rights Watch, 2016). Banyaknya pengungsi yang datang ke Yordania juga dianggap menyebabkan ketidakstabilan politik. Sebab, selain menjadi beban ekonomi, keamanan Yordania juga terancam dengan adanya kemungkinan bahwa sebagian pengungsi tersebut telah dipengaruhi oleh ideologi Negara Islam yang dicanangkan sendiri atau ISIS. Menghadapi hal ini, Pemerintah Yordania membuat kebijakan untuk membendung arus pengungsi. Akibatnya, lebih dari 15.000 pengungsi Suriah terlantar di perbatasan antara Suriah dan Yordania (Satloff & Schenker, 2016).

### **C. Pengungsi Suriah di Yordania, dan Masalah yang Dihadapi dalam Penanganannya**

Pada tahun 2014, jumlah pengungsi Suriah di Yordania mendekati angka 600.000 orang. Hingga akhir tahun 2016, Yordania menjadi tuan rumah bagi 731.130 pengungsi yang datang dari Suriah. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari 656.675 pengungsi yang merupakan penduduk asli Suriah, dan 58.455 pengungsi dari Iraq yang terdaftar di UNHCR, serta 16.000 pengungsi Palestina yang terdaftar di United Nations Relief and Works Agency for Palistine Refugees in the Near East (UNRWA) (Danish Refugee Council, 2016). Para pengungsi Suriah di Yordania ditempatkan di kamp-kamp yang berada di berbagai daerah. Kurang dari 20% berada di kamp Zaatari yang terletak 5 Km dari kota Mafraq. 40% dari beban kasus berada di Mafraq dan Irbid, Yordania utara, di sekitar kota Mafraq dan Ramtha. 40% lainnya berada di ke gubernuran tengah Amman, Zarqa, Balk dan Madaba. Sisanya tersebar di Maan, Karak dan Tafileh. Dari semua pengungsi Suriah tersebut, 18% di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia lima tahun; 27% dari keluarga pengungsi yang terdaftar dipimpin oleh satu rumah yang dikepalai oleh wanita; dan 3% di antaranya adalah lansia (Danish Refugee Council, 2014).

Setelah berhasil melarikan diri dari konflik di negaranya, banyak isu yang dihadapi oleh pengungsi Suriah, baik dalam usahanya untuk masuk ke Yordania maupun setelah berada dalam negara Yordania. Pertama, Polisi Perbatasan Yordania membatasi jumlah pengungsi Suriah yang boleh masuk ke dalam Yordania sejak tahun 2014, bertentangan dengan pernyataan Pemerintah Yordania bahwa perbatasan dibuka tanpa pembatasan. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya infiltrasi ekstrimis

dari Suriah maupun Yordania. Akibatnya, dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah pengungsi Suriah yang baru menjadi sangat rendah, yakni hanya sekitar 200/hari (Danish Refugee Council, 2014). Permasalahan ini masih berlanjut hingga akhir 2016, di mana pendaftar pengungsi yang baru menjadi sangat ketat dan tidak permisif, dan kurangnya sosialisasi mengenai syarat dan prosedur bagi pengungsi Suriah agar dapat terdaftar dan masuk ke Yordania (Jordan INGO Forum, 2016).

Kedua, masalah keamanan yang rendah seperti kondisi tempat tinggal dan perlengkapan yang tidak memadai bagi para pengungsi saat musim dingin. Di samping karena cuaca, kondisi perekonomian yang buruk juga membuat keresahan sosial. Pemerintah Yordania menekan subsidi yang disediakan, seperti makanan, air, dan listrik secara bertahap. Selain itu, muncul ketegangan antara pengungsi Suriah dengan penduduk Yordania karena persepsi bahwa pengungsi Suriah mengurangi akses mata pencaharian, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan bagi penduduk asli Yordania.

Ketiga, masalah logistik bagi INGOs dan berbagai penyedia bantuan lain. Meskipun akses untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Suriah dan penduduk Yordania yang terkena dampaknya cukup mudah, namun para penyedia bantuan tidak dibebaskan dari pajak dan justru pajaknya tinggi. Misalnya saja telepon dan internet yang sangat mahal sehingga menghambat komunikasi.

Keempat, masalah sumber daya manusia. Jumlah petugas yang berkualitas dari penyedia bantuan kemanusiaan seperti DRC lebih banyak di Yordania bagian utara dan sedikit di bagian Selatan. Selain itu, adanya hambatan

bahasa di mana semua dokumen resmi berbahasa Arab, dan para staff penyedia bantuan pun tak semuanya fasih berbahasa Inggris dan Bahasa Arab.

Kelima, masalah kerangka hukum di mana INGOs penyedia bantuan harus terdaftar di bawah payung kementerian pembangunan sosial untuk bisa beroperasi secara legal di Yordania. Untuk masalah-masalah administrasi yang besar, para INGOs penyedia bantuan harus mendapat persetujuan langsung dari kementerian-kementerian terkait. Kemudian, INGOs tersebut harus memberikan laporan mengenai proyek-proyek yang telah dilaksanakan, dan memberikan rancangan proyek selanjutnya untuk mendapatkan selanjutnya. Tak hanya itu, izin operasi para INGOs itu bisa dicabut oleh kementerian terkait kapan saja dan tanpa adanya klarifikasi.

Keenam, proses persetujuan yang menantang. Setiap usulan proyek yang akan dijalankan untuk membantu para pengungsi tersebut, harus diajukan ke Kementerian Perencanaan dan Kerjasama Internasional atau Ministry of Planning and International Cooperation (MoPIC) terlebih dahulu. Kemudian, MoPIC akan mengajukan usulan proyek tersebut dan anggaran dana lainnya ke komisi khusus untuk mendapat persetujuan. Pada tahap tersebut, komisi khusus bisa saja meminta klarifikasi dan modifikasi atas proyek yang diajukan. Bila sudah mendapat persetujuan dari komisi khusus, maka proyek tersebut akan didukung oleh perdana menteri Yordania. Proses administrasi ini sebenarnya merupakan kendala bagi DRC dan berbagai INGO lain sebagai pengusul proyek, karena memakan waktu yang cukup banyak, bahkan bisa mencapai waktu hingga tiga bulan. Lamanya proses administrasi ini disebabkan oleh terdapatnya DRC

di MoI dan bukannya di MoPIC langsung, sehingga proses berbagi pengetahuan antara pengaju dan pemberi persetujuan usulan proyek terhambat. Termasuk di antaranya adalah informasi mengenai prosedur yang diperlukan oleh pemangku kepentingan administrasi Pemerintah Yordania seperti MoPIC dan Departemen Tenaga Kerja atau Ministry of Labor (MoL) saat bekerja sama dengan INGO seperti DRC. Selain karena DRC tidak terdaftar di MoPIC langsung, lambatnya proses administrasi ini juga dikarenakan Pemerintah Yordania yang secara sistematis memilih untuk memberikan persyaratan keuangannya secara terpisah untuk semua Rencana Tanggap Daerah. Dengan begitu, Pemerintah Yordania bisa mengendalikan atau setidaknya memengaruhi intervensi kemanusiaan terhadap krisis pengungsi Suriah yang terjadi di negaranya (Danish Refugee Council, 2014).